

DEVIASI PENERAPAN ASPEK HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Slamet Widodo

Prodi Studi Teknik Sipil-Program Magister, Universitas Islam Indonesia, D.I
Yogyakarta

Email: 21914024@students.uii.ac.id

Akhmad Suraji

Prodi Studi Teknik Sipil-Program Magister, Universitas Islam Indonesia, D.I
Yogyakarta

Albani Musyafa

Prodi Studi Teknik Sipil-Program Magister, Universitas Islam Indonesia, D.I
Yogyakarta

Korespondensi penulis: 21914024@students.uii.ac.id

Abstract. *In construction projects in Indonesia most experience deviations. Deviation arises due to a discrepancy between the work in the field and the contract that has been stated. With the problems that exist in the field by service providers that are not in accordance with the initial contract cause losses. The research was conducted by collecting data from institutions that have authority on this issue, namely: PPK, BPK, and regional inspectorates. Data was also obtained through questionnaires that had been filled out by respondents regarding the type of deviation, the impact of deviation, the causes of deviation, and deviation actors. Data processing is carried out using the Delphi method to conduct questionnaires and the Multiple Deviation Analysis method for processing and classifying project data that has deviations. The results of data processing obtained the sequence of the highest to lowest deviation types, namely technical aspects by 85%, legal aspects by 10%, and administrative aspects by 5%. For the impact of deviation, the sequence results are obtained from highest to lowest, namely from Scope by 34%, Cost by 31%, Time by 22%, Quality by 13% and Safety by 0%. The amount of the construction project deviated according to the processing results, which was 5.51%. The cause of deviation comes from the discrepancy of the volume work carried out in the field with the contract that has been stated. The main culprit in the occurrence of deviation is from the contractor.*

Keywords: *Deviation, Construction Contract, Delphi, Multiple Deviation Analysis*

Abstrak. Dalam proyek konstruksi di Indonesia sebagian besar mengalami deviasi. Deviasi muncul karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ada dilapangan dengan kontrak yang telah tertuang. Dengan adanya permasalahan yang ada dilapangan oleh penyedia jasa yang tidak sesuai dengan kontrak awal menimbulkan kerugian. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data data Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap permasalahan ini yaitu : PPK, BPK, dan Inspektorat daerah. Data didapatkan juga melalui kuisisioner yang telah diisi oleh responden mengenai jenis deviasi, dampak deviasi, penyebab deviasi, dan pelaku deviasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Delphi untuk melakukan kuisisioner dan metode Multiple Deviasi

Received Februari 07, 2023; Revised Maret 2, 2023; April 22, 2023

* Slamet Widodo, 21914024@students.uii.ac.id

Analysis untuk pengolahan dan penggolongan data proyek yang mengalami deviasi. Hasil pengolahan data diperoleh hasil urutan jenis deviasi tertinggi hingga terendah, yaitu aspek teknis sebesar 85%, aspek hukum sebesar 10%, dan aspek administrasi sebesar 5%. Untuk dampak dari terjadinya deviasi diperoleh hasil urutan dari tertinggi hingga terendah, yaitu dari Scope sebesar 34%, Cost sebesar 31%, Time sebesar 22%, Quality sebesar 13% dan Safety sebesar 0%. Besaran proyek konstruksi terjadi deviasi menurut hasil pengolahan yaitu sebesar 5,51%. Untuk penyebab terjadinya deviasi berasal dari ketidaksesuaian pekerjaan volume yang dikerjakan dilapangan dengan kontrak yang telah tertuang. Pelaku utama dalam terjadinya deviasi adalah dari pihak kontraktor.

Kata kunci: Deviasi, Kontrak Konstruksi, Delphi, *Multiple Deviasi Analysis*

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Pada kontrak konstruksi perlu dibutuhkan bukti otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dalam dunia bisnis konstruksi khususnya pada kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa aspek di dalamnya seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan, perpajakan, serta sosial ekonomi. Pada umumnya para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa lebih mementingkan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek-aspek lainnya terutama aspek hukum. Para pihak baru memperhatikan aspek hukum ketika dalam pelaksanaan kontrak terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Kontrak kerja Konstruksi mengakibatkan para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dalam tahap pelaksanaan kontrak baik Pengguna jasa maupun Penyedia jasa diwajibkan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik serta tidak melanggar apa yang telah ditentukan di dalam kontrak, tetapi terkadang terjadi keadaan tertentu yang di luar kendali dari para pihak yang dapat membuat para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

Menurut, Yasin (2014), untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung, jalan raya, lapangan terbang, dan lain-lain tersebut diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang berbentuk kontrak, yang dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi atau perjanjian konstruksi atau *construction agreement* atau *construction Contract*. Dalam proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan yang ada dilapangan oleh penyedia jasa khususnya pada hukum kontrak sering mengalami deviasi.

Kendala utama dalam tahap pelaksanaan proyek disebabkan oleh keterkaitan dan pengaruh dari faktor biaya, waktu, dan mutu sumber daya. Hal ini dalam proyek konstruksi penyimpangan/deviasi yang biasa terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi oleh penyedia jasa yaitu mengenai volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang ada, kualitas material yang tidak sesuai dengan spesifikasi terhadap kontrak yang menimbulkan hasil yang kurang sesuai, tenaga kerja yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dan manajemen waktu yang kurang baik oleh perusahaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang menimbulkan perpanjangan waktu dalam penyelesaian proyek konstruksi. Dengan adanya permasalahan yang ada dilapangan oleh penyedia jasa yang tidak sesuai dengan kontrak awal menimbulkan kerugian. Dalam hal ini penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat agar tidak terjadi deviasi.

Permasalahan yang muncul dari latar belakang dalam penelitian ini adalah dengan adanya permasalahan yang terjadi oleh penyedia jasa yang mengalami deviasi aspek hukum kontrak konstruksi sehingga, peneliti ingin melakukan penelitian untuk membahas mengenai deviasi penerapan aspek hukum kontrak konstruksi di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui deviasi kontrak konstruksi, dampak deviasi, besaran deviasi, penyebab deviasi, dan pelaku deviasi kontrak konstruksi.

KAJIAN TEORITIS

Pekerjaan Konstruksi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang

meliputi pembangunan, pengopersian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan-kembali suatu bangunan.

Pengertian Kontrak Konstruksi

Menurut Subekti (1996), istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Pada sarjana lain, potheir tidak memberikan pembeda antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian contract dengan convention (pacte). Disebutkan bahwa convention (pacte) yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (opheffen) atau merubah (wijzegen) perikatan. Pada contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.

Menurut Bonenehu (2008), Kontrak konstruksi adalah suatu perjanjian untuk membangun suatu bangunan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yang dibuat oleh pihak I sebagai pemilik bangunan dan pihak II sebagai pelaksana bangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kontrak konstruksi diartikan sebagai “keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”.

Dasar Hukum Kontrak Konstruksi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Tinjauan Deviasi Kontrak Konstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Deviasi adalah suatu bentuk penyimpangan dari peraturan, terutama bentuk perilaku yang menyimpang atau melawan dari norma dan nilai sosial yang telah ditetapkan. Karena deviasi memiliki makna penyimpangan, maka selalu dikonotasikan secara negatif sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dianggap salah dan tidak semestinya.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Deviasi

Menurut Mubarak (2000), penyebab perilaku menyimpang pada diri seseorang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor bawaan adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Dalam faktor penyebab terjadinya penyimpangan atau deviasi secara umum, yaitu sebagai berikut.

1. Gagalnya atau ketidaksanggupan manusia dalam menyerap nilai dan norma sosial serta kebudayaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga tidak dapat mengetahui mana yang benar dan salah.
2. Dalam proses sosialisasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat tidak mengalami keberhasilan.
3. Adanya kesenjangan sosial yang menimbulkan perasaan iri sehingga memberikan dampak suatu tindak kriminal yang menyimpang dari norma hukum masyarakat.
4. Berkurangnya nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial dan perkembangan zaman.
5. Proses pembelajaran yang menyimpang dapat menyebabkan timbulnya suatu perilaku penyimpangan sosial, karena mulai banyaknya contoh perilaku menyimpang yang mudah dilihat maupun dibaca dan dipelajari.

Metode Delphi

Menurut Dilworth (1992), Metode Delphi adalah sebuah alat sistematis untuk mendapatkan konsensus dari sebuah kelompok ahli (panel). Setiap anggota kelompok ahli justru dijaga independensinya, sehingga setiap anggota bebas dalam mengemukakan pendapat. Metode Delphi diharapkan akan mendapatkan pendapat, konsensus atau masalah secara kualitatif. Koordinator kelompok ahli biasanya akan menanyakan suatu permasalahan kepada setiap anggota kelompok dengan mengedarkan kuesioner. Menurut Ciptomulyo (2001), Metode Delphi digunakan sebagai penjaringan opini kelompok yang partisipannya terdiri atas para pakar yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Penggunaan Metode Delphi

Menurut Barry et al., (2000), terdapat tiga kelompok peserta dalam Metode Delphi:

1. Pengambil keputusan yaitu sejumlah ahli yang berkelompok sebagai satu panel,
2. Koordinator yaitu seorang atau lebih yang bertugas mempersiapkan, mendistribusikan, mentabulasi dan menyimpulkannya selama proses pengambilan keputusan berlangsung, dan
3. Responden yaitu sejumlah orang yang keputusannya dinilai dan diperhatikan.

Multiple Deviasi Analysis

Dalam proses identifikasi penyimpangan pada suatu proyek, peneliti dihadapkan pada beberapa situasi yang membutuhkan alternatif pemilihan strategi atau analisa agar dapat mencapai sasarannya. Alternatif pemilihan strategi dalam menentukan suatu penyimpangan dengan menganalisis penyebab penyimpangan terhadap suatu proyek dengan memperhatikan kriteria dampak seperti waktu, Lingkup, kualitas, keselamatan dan biaya penyimpangan dibutuhkan untuk mendapatkan suatu Teknik MDA memfokuskan pada penyusunan dan penentuan mana penyimpangan yang dapat memberikan suatu dampak terhadap 5 kriteria waktu, lingkup, kualitas, keselamatan dan biaya serta lebih sesuai pada suatu kondisi yang dihadapi oleh organisasi.

Penggunaan Teknik *Multiple Deviasi Analysis*

Dalam penggunaan Teknik MDA dapat menyelesaikan beberapa solusi yang dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan beberapa Penyimpangan yang lebih berpengaruh dan keputusan potensial yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian,
2. Mengetahui penyimpangan sesuai dengan kriteria, dengan begitu dapat mengetahui dampak yang terjadi.
3. Mencapai konsensus mengenai besaran Kerugian terhadap penyimpangan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Data penelitian kuantitatif didapatkan hasil kuisisioner proyek konstruksi yang mengalami deviasi yang terjadi suatu penyebab dan menimbulkan dampak oleh para ahli dibidangnya. Subjek yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah institusi yang berwenang dalam mengetahui deviasi yaitu : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Inspektorat daerah, serta objek penelitian yang penulis akan teliti adalah proyek konstruksi yang mengalami deviasi pada daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Data penelitian berjumlah 20 data dengan batas nilai proyek maksimal 70 miliar. Data primer yang didapatkan berupa kuisisioner oleh BPK, PPK, dan Inspektorat daerah serta data sekunder berasal dari LHP, CCO, dan berita acara. Analisis data menggunakan metode Delphi untuk pengumpulan data dari responden penelitian dan metode *Multiple Deviasi Analysis* untuk menentukan penyimpangan yang terjadi dengan cara mengkategorikan sebagai administrative, hukum, dan teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Umum Penelitian

Data umum penelitian ini merupakan data deviasi pada proyek konstruksi yang didapatkan berasal dari sumber terpercaya. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berjumlah 20 data proyek konstruksi yang mengalami deviasi pada daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Berikut data proyek konstruksi yang mengalami deviasi beserta dengan penyebab dan dampak.

Tabel 1. Data Proyek Konstruksi Yang Mengalami Deviasi

No	Nama Proyek	Deviasi	No	Nama Proyek	Deviasi
1.	Pembangunan Penataan 18	2,13%	11.	Pembangunan Gedung 10	0,46%
2.	Pembangunan Gedung 20	0,12%	12.	Pembangunan Asrama 9	0,22%
3.	Pembangunan Gedung 17	0,37%	13.	Pembangunan Pasar 8	30,61%
4.	Pekerjaan Pembangunan Fasilitas 16	1,32%	14.	Pembangunan Pasar 7	30,97%
5.	Pekerjaan Pembangunan Gedung 15	1,61%	15.	Pekerjaan Konstruksi 6	0,47%
6.	Pembangunan SMP (14)	0,35%	16.	Pembangunan Masjid 5	0,10%
7.	Pembangunan 19	0,60%	17.	Pembangunan Pasar 4	31,39%
8.	Pembangunan Rumah Sakit 13	0,05%	18.	Pembangunan Gedung 3	4,41%
9.	Pembangunan Gedung 11	0,93%	19.	Pembangunan Ruang 2	1,36%
10.	Pembangunan Gedung 12	1,94%	20.	Pembangunan Ruang 1	0,72%

Analisis Data Menggunakan Metode Delphi

Metode delphi ini merupakan sebuah alat sistematis untuk mendapatkan konsensus dari sebuah kelompok ahli (panel). Setiap anggota kelompok ahli justru dijaga independensinya, sehingga setiap anggota bebas dalam mengemukakan pendapat. Dalam penelitian ini fungsi penggunaan metode delphi adalah untuk dilakukan kuisisioner terhadap narasumber yang memberikan informasi terhadap dampak dan penyebab setiap proyek konstruksi yang mengalami deviasi terhadap data yang diperoleh peneliti. Dalam penggunaan digunakan kelompok ahli untuk diberikan pertanyaan mengenai dampak dan penyebab terjadinya deviasi pada proyek tersebut. Dalam 3 kelompok ahli yang dijadikan narasumber dalam wawancara merupakan Lembaga yang bertugas dalam permasalahan proyek konstruksi yang bersinggungan terhadap deviasi yaitu : BPK, PPK, dan Inspektorat daerah.

Analisis Data Menggunakan *Multiple Deviasi Analysis*

Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan permasalahan penyebab dan dampak proyek yang mengalami deviasi setiap proyek konstruksi. Setelah diketahui permasalahan setiap proyek yang mengalami deviasi perlu dilakukan proses identifikasi penyimpangan pada suatu proyek, peneliti membutuhkan alternatif pemilihan strategi atau analisa agar

dapat mencapai sasaran identifikasi. Alternatif pemilihan strategi dalam menentukan suatu penyimpangan dengan menganalisis penyebab penyimpangan dengan 3 bagian yaitu secara hukum, administrasi, dan teknis terhadap suatu proyek dengan memperhatikan kriteria dampak yang terjadi dengan 5 bagian yaitu secara scope, quality, time, cost, dan safety. Berikut merupakan identifikasi menggunakan *Multiple Deviasi Analysis*.

Tabel 2. Intensitas Jenis Dan Penyebab Deviasi Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Jenis deviasi	Penyebab	Intensitas	Jumlah	Persentase
Hukum	Serah terima pekerjaan pertama tetap dilakukan walaupun pekerjaan belum selesai bobot 100%	1	4	10%
	koefisien upah serta koefisien dan harga bahan yang disusun lebih tinggi dari kebutuhan sebenarnya	2		
	PPK, PPTK, kontraktor dan konsultan pengawas tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku	4	4	10%
Administrasi	Keterlambatan dalam menyampaikan progres pekerjaan ke PPK	1	2	5%
	Laporan bulanan dibuat tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan	1		
Teknis	Peninjauan lapangan/MC-0 tidak dilaksanakan	1	33	85%
	Personil lapangan tidak kompeten	3		
	Manajemen proyek tidak memadai/kurang memahami kontrak	3		
	Keterlambatan dalam menyampaikan progres pekerjaan ke PPK	1		
	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	13		
	Tidak dilaksanakan oleh personil yang sesuai dengan kontrak	1		
	Pekerjaan tidak sesuai kontrak	2		

Lanjutan Tabel 2. Intensitas Jenis Dan Penyebab Deviasi Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Jenis deviasi	Penyebab	Intensitas	Jumlah	Persentase
Teknis	Adanya keterlambatan waktu penyelesaian	4	33	85%
	Selisih harga UPS di katalog lebih tinggi dari harga dipasar	1		
	Adanya biaya umum (<i>Overhead</i>)	1		
	Spesifikasi teknis material tidak memenuhi	3		
		Jumlah	39	100%

Tabel 3. Intensitas Dampak Deviasi Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Dampak Deviasi	Dampak	Intensitas	Jumlah	Persentase
<i>Scope</i>	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	7	11	34%
	Terdapat selisih antara laporan kemajuan pekerjaan dan hasil pelaksanaan dilapangan	3		
	Penggantian material yang tidak diadministrasikan	1		
<i>Quality</i>	Mutu pekerjaan tidak tercapai	3	4	13%
	Kualitas finishing tidak sesuai	1		
<i>Time</i>	Penambahan waktu akibat perbaikan	1	7	22%
	Waktu penyelesaian mengalami kemunduran tidak sesuai dengan kontrak	3		
	Timbul denda keterlambatan $1/1000 * NK * 60 HK$	1		
	Penyedia jasa menerima pembayaran pekerjaan melebihi hasil pekerjaan dilapangan	2		
<i>Cost</i>	Penambahan biaya pelaksanaan akibat denda	2	10	31%
	Pengurangan biaya pelaksanaan	2		
	Pengembalian material sisa	1		
	Pengembalian biaya pelaksanaan	4		
	Spesifikasi teknis UPS tidak sesuai	1		
<i>Safety</i>	-	0	0	0%
		Jumlah	32	100%

Pembahasan

Jenis Deviasi Pada Kontrak Konstruksi

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi ternyata sering terjadi deviasi dalam penerapan kontrak konstruksi. Dalam deviasi kontrak konstruksi dapat digolongkan menjadi 3 yaitu aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek teknis. Didapatkan berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa presentase terbesar terjadinya deviasi adalah dari aspek teknis dengan presentase 85%. Deviasi dari aspek teknis terbesar berasal dari volume pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa tidak sesuai dengan kontrak proyek sehingga dapat dikatakan telah melanggar dari aspek hukum konstruksi.

Dampak Deviasi Pada Kontrak Konstruksi

Hasil analisis dampak deviasi pada kontrak konstruksi didapatkan Scope sebesar 34%, Quality sebesar 13%, Time sebesar 22%, Cost sebesar 31%, dan Safety sebesar 0%. Dampak terbesar dari deviasi adalah Scope dengan presentase 34%. Dalam Scope hal terbesar yang terjadinya deviasi berdampak pada ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dikerjakan dengan volume yang tertuang pada kontrak. Scope (ruang lingkup) meliputi secara keseluruhan pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan suatu proyek agar menghasilkan produk proyek sesuai dengan rencana/kontrak. Dampak terjadinya deviasi pada scope merupakan tertinggi karena ruang lingkup yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak yang menimbulkan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilapangan dengan volume yang ada dikontrak.

Besaran Deviasi Pada Kontrak Konstruksi

Berdasarkan dari Tabel 1. mengenai besaran deviasi kontrak konstruksi menunjukkan bahwa presentase yang didapatkan berdasarkan data sebesar 5,51%. Presentase tersebut tergolong besar untuk pelaksanaan proyek konstruksi. Presentase tersebut didapatkan terbesar dari pekerjaan volume yang dilaksanakan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak khususnya pada pekerjaan struktur bangunan Gedung.

Penyebab Deviasi Pada Kontrak Konstruksi

Penyebab deviasi pada kontrak konstruksi berdasarkan 3 aspek yaitu aspek hukum, aspek teknis, dan aspek administrasi. Berdasarkan Tabel 5.66 Intensitas Jenis Dan Penyebab Deviasi Pelaksanaan Proyek Konstruksi didapatkan presentase terbesar pada

aspek teknis dengan presentase 85%, aspek hukum 10%, dan aspek administrasi 5%. Pada aspek teknis didapatkan poin terbesar yaitu volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dengan jumlah sebanyak 13. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sering terjadi pada pekerjaan proyek konstruksi. Menurut badan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam informasi mengenai deviasi setiap proyek konstruksi yaitu : BPK provinsi, PPK provinsi dan Inspektorat daerah setempat telah menyetujui bahwa penyebab terbesar yaitu aspek teknis dengan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Pelaku Deviasi Pada Kontrak Konstruksi

Pelaku deviasi pada kontrak konstruksi dapat berasal dari pihak owner, pihak konsultan perencana maupun pengawas, dan pihak kontraktor. Pelaku deviasi dapat dikatakan sebagai oknum terjadinya deviasi pada setiap proyek konstruksi. Menurut badan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam informasi mengenai deviasi setiap proyek konstruksi yaitu : BPK provinsi, PPK provinsi dan Inspektorat daerah setempat telah menyetujui bahwa pelaku deviasi terhadap 20 data yaitu dari pihak kontraktor. Pihak kontraktor sering mengalami permainan pada perubahan volume yang dikerjakan. Pihak konsultan sering menegur dan mengingatkan kepada kontraktor tetapi hanya diabaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis deviasi pada kontrak konstruksi terbesar adalah aspek teknis dengan presentase 85%.
2. Dampak deviasi pada kontrak konstruksi terbesar adalah Scope dengan presentase 34% pada ketidaksesuaian volume pekerjaan yang dikerjakan dengan volume yang tertuang pada kontrak.
3. Besaran deviasi pada kontrak konstruksi memiliki rata-rata berdasarkan data yang diperoleh sebesar 5,51% pengembalian uang negara yang berasal dari ketidaksesuaian volume khususnya pada bangunan struktur.
4. Penyebab terjadinya deviasi pada kontrak konstruksi terbesar adalah dari aspek teknis mengenai volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

5. Pelaku deviasi pada kontrak konstruksi adalah dari pihak kontraktor.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan saran sebagai berikut :

1. Pasal penajaman pada batang tubuh UU Jasa Konstruksi tentang pembayaran/termin pekerjaan jasa konstruksi diadakan serah terima barang/pekerjaan oleh penerima barang.
2. Panitia penerima barang bertanggung jawab kepada PPK/pengguna anggaran barang.
3. Panitia penerima barang pemeriksa memiliki kewenangan penuh dalam penentuan diterima/tidak diterima kualitas dan kuantitas barang.
4. Panitia penerima barang dibentuk anggotanya dari independen/gabungan dari beberapa instansi.
5. Penyedia barang/kontraktor berkewajiban melengkapi data-data administrasi berupa :
 - a. Presentasi barang yang akan dibayarkan oleh pengguna barang.
 - b. Foto dokumentasi material dan proses pelaksanaan.
 - c. Bukti uji laboratorium/uji teknis.
 - d. Data kualitas.
 - e. Data kuantitas.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Mubarak. (2000). Al Irsyad an nafsy : konseling agama teori dan kasus. Bina Rena Pariwisata.
- Arikunto. (2013). prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. rineka cipta.
- Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara.
- Barry, R., Ralph, M. S., Michael E. Hanna, & Trevor S. Hale. (2000). Quantitative Analysis for Management (THIRTEENTH EDITION). Prentice Hall.
- Christiawan, R. (2020). KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan□, 9(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630>
- Ciptomulyo, U. (2001). Integrasi metode Delphi dan Prosedur Analisis Hierarkhis (AHP) untuk identifi kasi dan penetapan prioritas objektif/kriteria keputusan. Jurnal IPTEK 12.

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Daniel, E., & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium PKN Universitas Pendidikan Pancasila.
- Dilworth, J. B. (1992). *Operation Management: Design, Planning and Control for Manufacturing and Services*. Mc. Graw Hill.
- Doro, E., & Stevalin, B. (2009). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. *Jurnal Informatika*, Vol.5, No. 1, Juni 2009.
- Emzir. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Feydy Bonenehu. (2008). Analisis Klausula Kontrak Kerja Konstruksi Dengan Pendekatan Standart Kontrak FIDIC 1999 dan UUK RI No.18 Tahun 1999.
- FIDIC. (1999). *The Construction Contract*.
- Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak Ridwan Khairandy, L. (2011). *Ridwan Kh* (Vol. 18).
- Firman Wijaya. (2022). Klaim Kompensasi Biaya Keterlambatan Dan Deviasi Kompensasi Kontrak Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- Graham, B., Regher, G., & Wright, J. G. (2003). Delphi as a method to establish consensus for diagnostic criteria. *Journal on Clinical Epidemiologi* 56.
- Herlina, V. (2019). *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisisioner Menggunakan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Isnanto. (2009). *Pengertian & Perbedaan Type Kontrak*.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.
- Kartini Kartono. (2015). *Patologi Sosial Jilid 1 (Cetakan ke-15)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Moleong, L. J. (2006). *Metodeogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muh Pelaksana Dinas PUPR Kabupaten Kuningan Jawa Barat, D. N. (2018). *FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK CHANGE ORDER PADA PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN AIR (Vol. 4)*.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salamba Medika.
- Pangeran, M. H. (2019). *MODEL ESTIMASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN PENDEKATAN FUZZY-DELPHI (Vol. 13, Issue 2)*.
- Purwanto. (2018). *Teknik penyusunan instrumen uji validitas dan reliabilitas penelitian ekonomi syariah*. Staial Press.
- Roeslan Saleh. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. aksara baru.

Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)

Vol.2, No.2 Mei 2023

e-ISSN: 2963-7813; p-ISSN: 2963-8178, Hal 53-67

- Subekti. (1996). Hukum Perjanjian (Cet. XVI). Intermasa.
- Sudarsana, D. K. (2008). Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu Pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* Volume 12 (2) Juli 2008.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suhartini, E. (2020). OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM ASPEK KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI WILAYAH BOGOR.
- Supriati. (2015). Metodologi penelitian.
- Sutjahjo, K. D., & Setiyadi, D. (2016). ASPEK HUKUM TERHADAP KEGAGALAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK DI JAKARTA.
- Tirtodiningrat, K. R. M. T. (1966). *Ichisar hukum perdata dan hukum dagang / K.R.M.T Tirtodiningrat (K. R. M. T. Tirtodiningrat, Ed.; Cet.19). Pembangunan.*
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI. (2017).
- Wulfram I. ervianto. (2005). Manajemen proyek konstruksi (Ed. rev.). andi.
- Yasin, N. (2014). Kontrak konstruksi di Indonesia (Ed.2, Cet. 3). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yousuf, M. I. (2007). Using Experts' Opinions Through Delphi Technique. *A Peer Reviewed Electronic Journal*, 12(4).
- Yuliana, C. (2004). Faktor-faktor Potensial Terjadinya Perselisihan Kontrak pada Proyek Gedung (Vol. 5, Issue 1).